













taubatnya atau tidak diampuni. Sedangkan pada ayat kelima dijelaskan bahwa kemurkaan Allah swt. akan menyimpannya. Dan pada ayat terakhir, orang-orang kafir tersebut tidak akan dapat memberi *maḍarat* sama sekali kepada Allah swt. Namun tidak ada satu pun ayat di atas yang menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad.

Perlu dicatat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad turun di periode Madinah, ketika negara Islam didirikan, dan hanya surat al-Naḥl 106 saja yang termasuk kategori Makkiyyah.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan, dari sekian ayat yang berkenaan dengan murtad, tidak ada satu pun ayat yang mencamtumkan perintah eksekusi mati bagi pelaku murtad. Bahkan, ayat-ayat tersebut memberikan konsekuensi hukuman di akhirat, tidak ada sanksi atau pun hukuman yang bersifat duniawi.

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam Alquran maupun *al-Sunnah* dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya jika perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk *murtad*, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut, maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat *ukhrawi*. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan termasuk dalam jarimah *tasabbub 'alā al-din al-ghaīr* (mencaci maki agama lain). Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain

---

<sup>11</sup> M. Robith Fuadi Abdullah, "Meninjau hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Kajian Hadis Tematik)" *de Jure*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2012), 29.







































ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Casare Beccaria. Perbuatan-perbuatan criminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*).

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas.

5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Tujuan ini banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja

keatrampilan.<sup>36</sup> Untuk mencapai tujuan ini tentu tidaklah mudah, selain ikut andil, pemerintah juga harus bekerja maksimal dengan membuat aturan undang-undang serta program-program yang akan dicapai. Selain itu masyarakat pun juga harus sepakat mendukung peraturan serta program-program yang telah dibuat pemerintah.

Tahun 1948 merupakan tahun bersejarah dunia, setelah perang dunia ke-II, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara-negara di dunia menyerukan undang-undang terkait hak asasi manusia, undang-undang tersebut menekankan pada hak kebebasan, keadilan serta perdamaian dunia. Sudah tidak asing lagi, undang-undang tersebut dikenal dengan *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Dengan lahirnya Deklarasi ini setiap individu akan lebih leluasa dengan hak kebebasannya, diharapkan setiap individu mulai sejak lahir memiliki kebebasan, keadilan serta keamanan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dikuatkan dan diinterpretasikan oleh negara di dunia Ketiga, dengan maksud menyesuaikan dengan filosofi dan budaya lokal atau regional serta untuk mewujudkan stabilitas nasional sebagai persyaratan bagi pembangunan. Negara-negara Muslim pun berusaha memahami HAM ini dalam konteks Islam, sehingga pada 1990 negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*. Dalam Deklarasi ini antara lain disebutkan, bahwa hak dan kebebasan harus tunduk kepada syariah (pasal 25).

---

<sup>36</sup> A. Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 15.



yang absolut dan statis. Ketika kita menguji dinamika dan perkembangan hubungan Islam dan HAM, kita akan menemukan bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM.<sup>40</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan suatu standar umum yang harus dicapai oleh semua rakyat dan bangsa, agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, berusaha dengan perantaraan pengajaran dan pendidikan untuk menyokong rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan ini dan dengan tindakan-tindakan yang progresif, baik ditingkat nasional maupun internasional, untuk menjamin pegakuan universal dan pelaksanaan efektif hak-hak tersebut, baik di kalangan bangsa-bangsa di negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun di kalangan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang termasuk dalam yurisdiksinya.<sup>41</sup> Sehingga hak dan kebebasan yang menjadi salah satu tujuan HAM semua bersifat universal.

Deklarasi Hak Asasi Manusia telah berusaha untuk tidak menggunakan agama apa pun dalam menjustifikasi ide-ide dasarnya. Tujuannya adalah agar Deklarasi HAM mampu menemukan dasar yang sama bagi mereka yang beragama maupun tidak. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa HAM hanya bisa didasarkan pada justifikasi sekuler karena cara seperti itu tidak bisa menjawab persoalan bagaimana melegitimasi dan mengesahkan HAM berdasarkan perspektif yang sangat beragam di dunia ini. Logika yang dibangun dalam

---

<sup>40</sup> Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Lieralisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015) 116.

<sup>41</sup> Abu al-A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 50.

























